

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sampah perkotaan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, pencemaran tanah, air dan kurangnya nilai kebersihan dan keindahan lingkungan (Nugraha et al., 2018).

Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang tepat merupakan salah satu strategi penanganan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah. Kuantitas sampah terus bertambah seiring semakin beraneka ragamnya pola konsumsi dan meningkatnya jumlah penduduk. Dua sisi perspektif adanya TPA dalam kehidupan, dibutuhkan sekaligus dimusuhi keberadaannya. Luaylik, (2014). Uraian tersebut menjelaskan bahwa di satu sisi tempat pembuangan akhir (TPA) sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimana fungsinya sebagai tempat untuk menyingkirkan sampah sehingga aman, di satu sisi sampah tersebut dapat mencemari lingkungan, mengganggu, membunuh dan merusak ekosistem, dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, jika sampah-sampah tersebut tidak terkelola dengan baik

Kebijakan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Di dalam UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan penambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Konsumsi masyarakat berupa makanan maupun barang di dalam kemasan, khususnya kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti kantong plastik) dapat menyebabkan sampah-sampah kantong plastik terus menumpuk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persoalan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitarnya. (Subarudi, Ariawan, Mulyadin dan Iqbal, 2022).

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan sampah di setiap kota/kabupaten, baik dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan dapat dikarenakan keterbatasan kualitas maupun kuantitas pada sarana prasarana dan Sumber Daya Manusianya (SDM). Dalam hal, ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat dalam melakukan pengelolaan sampah. Prediksi jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah timbulan sampah. Seiring semakin beraneka ragamnya serta meningkatnya pola konsumsi. Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan diperkirakan semakin meningkat, merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menciptakan, mengembangkan dan mengawasi kegiatan penanganan pengolahan sampah. Luaylik, (2014)

Seperti halnya Kabupaten Bangkalan, seiring dengan bertambahnya penduduk yang mencapai 1.072.757 jiwa (Dispenduk Capil, 2019) dan

keanekaragaman kegiatan yang berpotensi menimbulkan produk samping dari kegiatan tersebut, yaitu sampah yang berdasarkan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) (2019), Kabupaten Bangkalan menghasilkan 47.293.59 ton sampah per tahunnya. Berikut perkembangan komposisi timbunan sampah di Kabupaten Bangkalan:

**Tabel 1.1**  
**Informasi Komposisi Timbunan Sampah Di Kabupaten Bangkalan**

<b>Komposisi Sampah Berat</b>	<b>Banyaknya</b>
<b>Botol Kaca</b>	0.90%
<b>Kaca, Keramik, Batu</b>	2,03%
<b>Sampah Dapur</b>	52,32%
<b>Kaleng</b>	0.20%
<b>Logam Lainnya</b>	0,43%
<b>Lain-lain</b>	2,81 %
<b>Kardus / Karton</b>	0,38%
<b>Kertas Lainnya</b>	9,34%
<b>Plastik Kertas</b>	1, 51%
<b>Botol Plastik</b>	4,54%
<b>Plastik Lunak</b>	8,92%
<b>Karet dan Kulit</b>	0,29%
<b>Kain</b>	1,02%
<b>Kayu dan Rumput</b>	15,32%

*Sumber data : komposisi sampah JICA, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, komposisi sampah di Kabupaten Bangkalan, antara lain : 0.90% botol kaca, 2.03% kaca, keramik, batu, 52.32%, sampah dapur, 0.20% kaleng, 0.43% logam lainnya, 2.81% lain-lain, 0.38% kardus/karton, 1,51% plastik keras, 4.54% botol plastik, 8.92 % plastik lunak, 0.29% karet dan kulit, 1.02% kain, 15.32% kayu dan rumput. Menerangkan bahwa komposisi sampah terbesar berasal dari kegiatan sehari-hari yang dihasilkan menjadi sampah dapur.

Menurut Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012, menjelaskan wilayah membutuhkan lahan untuk mengelola sampah, di wilayah tersebut dan terdapat tiga (3) jenis tempat yang harus difasilitasi pemerintah, antara lain: Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan tempat pengolahan sampah terpadu; Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Maka dalam mengurangi ancaman yang dihasilkan sampah, pemerintah Kabupaten Bangkalan wajib memfasilitasi lahan untuk tempat-tempat pelaksana pengelolaan sampah dalam mengurangi timbulan sampah yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan.

TPA Buluh, Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu tempat pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan. Keberadaan TPA desa Bunajih Kecamatan Labang menjadi kajian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam bidang lingkungan hidup. Terlebih lagi sumber timbulan sampah semakin meningkat sehingga memerlukan manajemen pengolahan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan adalah dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Bangkalan, seperti dilansir di [Surya.co.id](http://Surya.co.id) | Bangkalan - 13 Oktober 2021.

“Di kota, kami sudah memiliki lima unit TPS 3R. Kami akan mengoptimalkan setiap unitnya untuk mengurangi pengiriman sampah ke TPA. Produksi harian sampah mencapai 60 ton per hari. Kami berupaya setiap TPS 3R mampu mereduksi sampah hingga 70 persen. Sehingga akhirnya hanya 30 persen residu sampah yang dikirim ke TPA” ungkap Anang Yulianto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangkalan”

Dapat dijelaskan TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat pemrosesan Akhir (TPA) dengan seiring berkembangnya teknologi. Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kemampuan dari pemerintah daerah dalam mereduksi tumpukan sampah yang berada di TPS belum optimal.

Selain itu, upaya Kabupaten Bangkalan dalam mengelola sampahnya sangat diharapkan warganya seperti yang dilansir [Surya.co.id](http://Surya.co.id) | Bangkalan, 12 Maret 2020, “Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bunajih Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap warga setempat. "Pengolahan sampah sampai ke ompos hingga menjadi pupuk. Seperti itu yang diinginkan masyarakat," ungkap Kepala Desa Bunajih Bangkalan Syamsul Arifin”

Berdasarkan temuan peneliti, TPA Labang di Desa Bunajih Kecamatan Labang ini merupakan satu-satunya TPA yang masih beroperasi yang menjadi

harapan warga Kabupaten Bangkalan bebas penumpukan sampah. Namun, terdapat artikel yang memperlihatkan kondisi sampah di Kabupaten Bangkalan yang dilansir Mata MaduraNews.com | Bangkalan, 7 Juni 2021,

“Banyak sampah di pinggir jalan tak terurus. Faktornya adalah tidak adanya fasilitas yang memadai. Sehingga tidak heran lagi masyarakat membuang di pinggir jalan,” papar Mustaqim yang merupakan salah satu mahasiswa dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Socah (IKMS) yang menggelar aksi demo pada Senin (7/6/2021). Karenanya, Mustaqim mendesak untuk segera memperbaiki kinerjanya sekaligus jajaran Pemkab Bangkalan khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).”

Oleh sebab itu permasalahan sampah yang sering muncul dalam penanganan sampah yaitu sedikitnya lahan untuk pembuangan sampah, biaya operasional pengangkutan sampah. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam jangka panjang yaitu mencemari lingkungan.

Permasalahan muncul ketika pembagian wilayah TPA antara lain zona penyangga dan zona budi daya terbatas sudah berkurang daya gunanya. Seperti zona penyangga semakin menyempit. Sedangkan kawasan Zona penyangga mutlak diperlukan karena berfungsi memberikan perlindungan kepada penduduk melakukan kegiatan sehari-hari terutama dari dampak secara langsung lingkungan. Luaylik, (2014)

Kemudian besarnya volume sampah ini tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Hingga saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan masih menganut sistem lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Di sisi lain, sampai saat ini masalah

penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang. Persoalan pengelolaan sampah Kabupaten Bangkalan tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Masalah persampahan menurut Darmanto, (2012) perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Penyebab timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan yaitu seperti: limbah padat atau sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, polusi bau dari sampah yang membusuk, pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai atau badan air dan merembesnya air lindi (*leachate*) dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah kelahan atau pemukiman dan sumber air penduduk. Penyebab tingginya volume sampah di Kabupaten Bangkalan ini di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sangat beragam. Jumlah volume sampah terus meningkat, sementara daya tampung TPA sampah terbatas dengan pengelolaan yang belum ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, (2021).

Kendala persoalan sampah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara lain: a). Jarak tempuh TPA dengan sumbernya saat ini cukup jauh. b). Sarana dan Prasarana cukup terbatas. c). Biaya operasional pengangkutan cukup tinggi. d). Kolam lindi belum difungsikan. e). Sumur monitoring dan

Tanaman sekitar TPA belum difungsikan f). Masyarakat yang memanfaatkan keberadaan TPA. Berdasarkan uraian tersebut berikut data pengelolaan timbunan sampah di Kabupaten Bangkalan tahun 2016-2021:

**Tabel 1.2**  
**Pengelolaan Timbunan sampah Di Kabupaten Bangkalan**

No	Kecamatan	Tahun	Timbunan Sampah	Penanganan
1	Bangkalan	2016	16757,88	6032,82
2	Socal		1070,74	385,47
3	Kamal		4549,55	1637,84
4	Burneh		5793,48	2085,65
5	Bangkalan	2017	20947,34	7541,04
6	Socal		1338,42	481,83
7	Kamal		5686,94	2047,31
8	Burneh		7241,85	2607,07
9	Bangkalan	2018	26184,18	9426,31
10	Socah		1673,03	602,29
11	Kamal		7108,67	2559,12
12	Burneh		9052,32	3258,84
13	Bangkalan	2019	27699,26	9971,74
14	Socah		2065,47	743,57
15	Kamal		8291,81	298,05
16	Burneh		9237,05	3325,34
17	Bangkalan	2020	28943	10419,8
18	Socah		2549,96	917,99
19	Kamal		10236,79	3685,25
20	Burneh		9425,57	3393,2
21	Bangkalan	2021	30467,2	10968,2
22	Socah		10546,4	936,72
23	Kamal		2602	3796,7
24	Burneh		10027	4609,79
Rata-rata			10812,32958	3822,164167

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bangkalan, data diolah, 2022.

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa tingkat timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dengan penanganan yang dilakuakn terhadap pengelolaan sampah terbilang masih kurang optimal, artinya pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Bangkalan perlu di evaluasi dan ditingkatkan lagi, mengingat dampak yang diakibatkan dari sampah tersebut dapat mengganggu lingkungan sekitar jika tidak di diatasi dengan baik.

Sehingga, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bangkalan”**.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan”?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan dalam pengelolaan sampah yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Manfaat yang diharapkan bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisa suatu masalah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh dengan literatur dan membandingkan keadaan yang sebenarnya. Juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sampah.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi ilmu yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penunjang pendidikan, serta dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok kajian serupa di masa yang akan datang.